

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Emilia Khristina Kiha¹, Kamilaus Konstanse Oki², Athanasius Seran³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor
Email : emilia.kiha02@gmail.com

ABSTRAK

Alokasi anggaran dalam membiayai pembangunan disuatu daerah tergantung pada arah dan tujuan daerah tersebut. Arah pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi pada alokasi belanja modal. Alasan mendasar alokasi tersebut karena ketersediaan infrastruktur pendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat terbatas karena wilayah adalah daerah kepulauan, kemampuan daerah kabupaten menyediakan menyediakan infrastruktur terbatas, jumlah penduduk penikmat layanan publik. Dengan kata lain, alokasi belanja modal Provinsi Nusa Tenggara Timur orientasi pada pembangunan fisik.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah runtut waktu (*time series*) dari tahun 2000-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk dan Anggaran Belanja Modal yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode analisis data menggunakan regresi berganda dengan menggunakan Program SPSS 20. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel jumlah penduduk yang berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kata Kunci : APBD, Bagi Hasil, Belanja Modal, NTT

PENDAHULUAN

Otonomi daerah mengamanatkan untuk setiap daerah mampu mengelola dan mengatur urusan pemerintahan sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan pemerintahannya, daerah diberikan bantuan fiskal oleh pemerintah pusat guna mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai wujud dari desentralisasi. Artinya, pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola semua potensi alam yang tersedia di daerah secara efektif, sebagai upaya mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Sesuai dengan hak dan kewenangan yang dimiliki, pemerintahan daerah diharapkan dapat menyediakan berbagai pelayanan publik terutama pada sektor publik. Upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik, tentu terdapat sebagian dana yang dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset daerah (Permatasari dkk, 2016).

Untuk menambah aset daerah, peningkatan sektor publik yang merupakan *output* dari belanja modal dan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, anggaran belanja modal sangat penting dalam pembangunan suatu daerah.

Realisasi anggaran belanja modal sangat bergantung pada kemampuan keuangan atau penerimaan suatu daerah. Makin tinggi penerimaan daerah, maka makin besar belanja suatu daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Fitriana dan Sudarti (2018) penelitiannya juga menyebutkan bahwa, realisasi anggaran belanja modal sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan pertumbuhan penduduk.

Dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang otonomi daerah, dijelaskan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), juga Dana Alokasi Umum (DAU). Semua bentuk keuangan tersebut diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah.

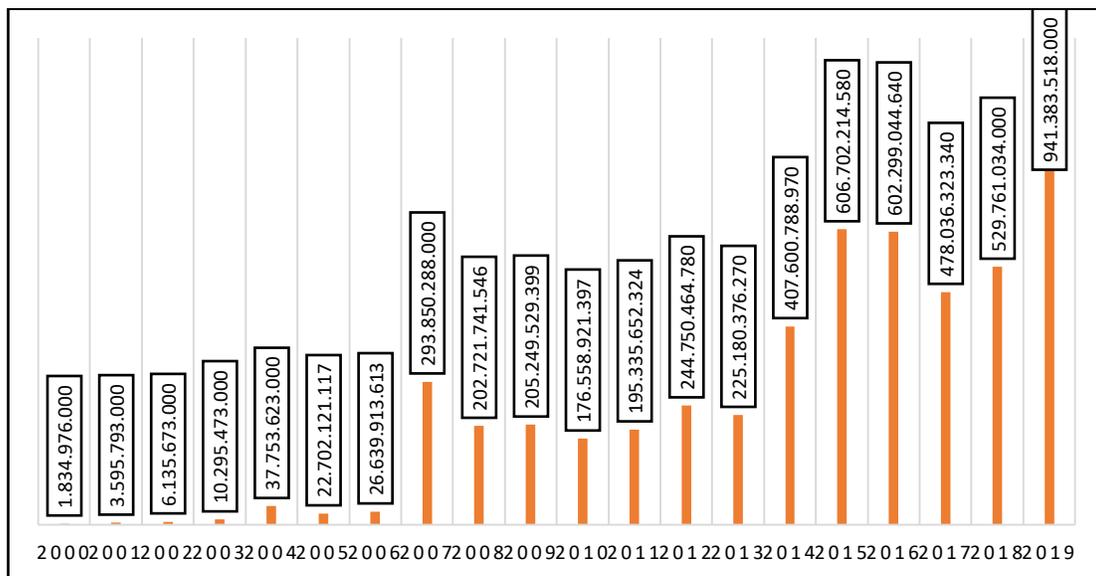
Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah provinsi yang juga menganut asas otonomi, sehingga memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sebagai pemerintahan daerah yang otonom, Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib merencanakan dan merealisasikan anggaran dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran ditata agar mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimisasi pelayanan publik (BPS, 2016).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin bertambah diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun terkadang peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal karena Pendapatan Asli Daerah banyak terserap untuk membiayai belanja lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rizanda (2013) dan Paujiah (2012) memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Adanya otonomi daerah masih menunjukkan kinerja pelayanan publik yang masih belum memuaskan (Yandri, 2012). Sehingga pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana

perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH). Sumber penerimaan Bagi Dana Hasil merupakan dana diberikan oleh pemerintah pusat atas berpindahnya hak pemungutan sumber pendapatan daerah kepada pemerintah pusat. Struktur dan postur Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara didominasi oleh dana perimbangan semenjak diberikan hak otonomi daerah. Kompleksitas persoalan ketidakmampuan keuangan daerah menyebabkan ketergantungan pemerintah provinsi pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Alokasi anggaran dalam membiayai pembangunan disuatu daerah tergantung pada arah dan tujuan daerah tersebut. Arah pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi pada alokasi belanja modal. Alasan mendasar alokasi tersebut karena ketersediaan infrastruktur pendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat terbatas karena wilayah adalah daerah kepulauan, kemampuan daerah kabupaten menyediakan menyediakan infrastruktur terbatas, jumlah penduduk penikmat layanan publik. Dengan kata lain, alokasi belanja modal Provinsi Nusa Tenggara Timur orientasi pada pembangunan fisik. Sebagaimana dikatakan oleh Mardiasmo (2002), belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya. Alokasi belanja modal Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2000-2019 nampak pada grafik berikut.



Grafik 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Modal NTT, Tahun 2000-2019

Sumber: BPS NTT. Tahun 2020

Grafik 1.1 di atas menunjukkan realisasi anggaran belanja modal Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2000 hingga 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahun. Alokasi anggaran belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp 941.383.518,000 dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar Rp 1.834.976.000 Faktor yang menyebabkan adanya peningkatan alokasi belanja modal karena kebutuhan pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat tinggi dan belum mampu disiapkan oleh pemerintah kabupaten secara mandiri, tingkat inflasi yang terus mengalami perubahan setiap tahun.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana dikatakan oleh Darise (2006), semakin baik Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat rendah jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lain pembentukan keuangan daerah. Kompleksitas persoalan minim kontribusi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan potensi daerah, manajemen pengelolaan, daya dukung masyarakat, kebijakan, *leadership* dan lain sebagainya.

Sumber dana lain yang mencerminkan kemampuan pengelolaan potensi daerah adalah Dana Bagi Hasil yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sebagaimana dikatakan oleh Undang Undang No. 33 Tahun 2004, bahwa sumber dana bagi hasil berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dana bagi hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Alokasi terbesar dana bagi hasil bersumber dari daerah pemberi kontribusi pembentukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Semakin besar kontribusi maka alokasi semakin besar pula, sebaliknya semakin kecil kontribusi maka nilai kompensasi juga semakin kecil.

Dana bagi hasil Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat kecil dari waktu ke waktu disebabkan oleh berbagai persoalan sebagaimana permasalahan penerimaan bersumber dari pendapatan asli daerah. Dana bagi hasil Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam undang undang adalah bersumber dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan cukai hasil tembakau. Penggunaan penggunaan bagi hasil pajak bersifat blockgrant, yaitu penggunaan dana diserahkan pada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Kecuali untuk dana bagi hasil cukai tembakau paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program atau kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai

ilegal. Sumber penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terlihat pada Tabel 1.1 berikut;

Tabel 1.1 PAD, DBH dan Jumlah Penduduk Provinsi NTT Tahun 2000-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Dana Bagi Hasil (X_2)	Jumlah Penduduk (X_3)
2000	136.605.167.324	24.986.087.123	3.948.600
2001	140.751.416.357	25.981.234.620	3.888.735
2002	147.374.418.980	28.704.875.700	3.924.871
2003	152.751.781.919	26.408.434.800	4.088.058
2004	156.808.618.757	34.321.453.511	4.188.774
2005	140.629.071.361	44.477.372.263	4.260.294
2006	175.951.829.851	48.713.441.323	4.355.121
2007	198.296.335.310	54.686.739.900	4.260.294
2008	237.286.164.010	53.820.333.838	4.534.319
2009	169.656.814.967	54.842.414.270	4.619.655
2010	201.493.571.167	68.647.419.180	4.683.827
2011	307.484.421.249	87.834.594.936	4.776.485
2012	398.524.546.972	10.088.415.497	4.899.260
2013	523.201.203.067	84.034.259.793	4.953.967
2014	763.300.806.702	76.821.847.000	5.036.897
2015	882.315.240.378	60.821.837.710	5.120.061
2016	995.186.120.952	91.213.201.570	5.203.514
2017	1.047.491.567.026	87.876.729.180	5.287.302
2018	1.015.913.775.993	86.834.315.000	5.371.559
2019	1.717.583.096.000	74.110.205.000	5.456.203

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terendah terjadi pada tahun 2000 sebesar Rp. 136.605.167.324 (Jutaan Rupiah), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah akan menambah aset atau kekayaan daerah.

Besarnya Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terendah pada tahun 2000 sebesar Rp. 24.986.087.123, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Sedangkan Jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur terendah pada tahun 2001 sebesar 3.888.735, Jumlah Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama sebulan atau lebih mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan

menetap melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin.

Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk, Dana Bagi Hasil juga merupakan dana perimbangan. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka jutaan rupiah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dua jenis yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Dana Bagi Hasil ini merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang dari sumber-sumber yang telah disediakan. Diambil dari bahan pustaka, Badan Pusat Statistik, penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah runtut waktu (*time series*) dari tahun 2000-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk dan Anggaran Belanja Modal yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Variabel Penelitian

Agar penelitian dapat berjalan dengan lebih baik, maka perlu diketahui beberapa unsur penelitian seperti konsep, definisi operasional dan lainnya. Pemahaman ini diperlukan pada proses teorisasi, karena adanya pengetahuan tentang unsur-unsur tersebut maka peneliti ini akan merumuskan hubungan-hubungan teori dengan baik.

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009). Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dirinci tentang variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini:

1. Variabel bebas (Independen)

Variabel bebas sering disebut juga sebagai variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya akan timbul variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), Jumlah Penduduk (X_3).

2. Variabel terikat (Dependent)

Variabel terikat sering disebut juga sebagai variabel dependen yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Anggaran Belanja Modal (Y).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis. Karena data bersifat makro, metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mendapatkan informasi

melalui catatan, literatur, dokumentasi, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Selain itu juga terdapat data-data laporan tertulis yang terkait dengan penelitian ini dari berbagai studi pustaka yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, website, dan jurnal-jurnal penelitian lainnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebagai berikut: “Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Dasar pengambilan untuk uji normalitas data adalah:

- a. Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastis

Uji heteroskedastis bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya terjadi korelasi diantara variabel bebas/variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan nol.

- a. Jika variabel bebas pada korelasi diatas 0,90, maka hal ini merupakan adanya multikolinieritas.
- b. Atau multikolinieritas juga dapat dilihat dari VIF, jika $VIF < 10$ maka tingkat kolinieritasnya masih dapat di toleransi.
- c. Nilai Eigen Value berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas mendekati 0 menunjukkan adanya multikolinieritas.

Metode Analisis data

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan pengembangan dari regresi linear sederhana dimana terdapat lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda digunakan untuk

melihat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependent (Y). Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_i$$

Keterangan:

Y : Anggaran Belanja modal

β_0 : Konstan

β_1 : Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (X_1)

β_2 : Koefisien regresi variabel dana bagi hasil (X_2)

β_3 : Koefisien regresi variabel jumlah penduduk (X_3)

X_1 : Variabel pendapatan asli daerah

X_2 : Variabel dana bagi hasil

X_3 : Jumlah penduduk

ϵ_i : Error term

a. Uji Koefisien Regresi (R)

Koefisien regresi (r), bertujuan untuk mengetahui keeratn hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

$$r = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Sumbangan Efektif (SE)

Sumbangan efektif (SE) dimaksudkan untuk mengetahui besar pengaruh atau kontribusi masing-masing Variabel bebas (X) terhadap besarnya nilai variabel tidak bebas (Y). Total kontribusi dari setiap variabel bebas (X) akan sama besarnya dengan nilai koefesien determinasi (R^2). SE adalah nilai koefesien korelasi (r-pm) x nilai koefesien Beta terstanderd Nilai SE ditampilkan dalam tabel berikut:

Sumbangan efektif (SE) setiap variabel bebas (X) terhadap variabel tidak bebas (Y).

No	Variabel	Nilai Korelasi r-pm	Koefesien Beta Terstanderd	SE
1	X_1 Pendapatan Asli Daerah	***	***	***
2	X_2 Dana Bagi Hasil	***	***	***
3	X_3 Jumlah Penduduk	***	***	***

Keterangan: Nilai tersebut akan di peroleh setelah analisis inferensial

Uji Hipotesis

Untuk melakukan pembuktian hipotesis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik, sebagai berikut:

Uji parsial (uji t)

Uji statisti t ini adalah untuk menguji keberhasilan koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara tunggal berpengaruh terhadap variabel terikat Y dengan membandingkan antara nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan nilai ttabel dengan derajat kesalahan 5% ($\alpha= 0,05$). Apabila nilai thitung \geq t tabel, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. Uji t ini menggunakan derajat kebebasan $df = n-k$ dimana $n =$ banyak observasi dan $k =$ jumlah regresor konstanta. Selain itu, pengujian ini dapat sekaligus digunakan untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk pengaruh terhadap anggaran Belanja Modal dengan melihat nilai-nilai t masing-masing variabel. Berdasarkan nilai t itu, maka dapat diketahui variabel bebas mana yang mempunyai pengaruh paling bermakna atau signifikan mempengaruhi variabel terkait.

Uji simultan (Uji F)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut memiliki tingkat signifikansi pada alpha 5%. Adapun metode untuk menentukan apabila nilai signifikan $< 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$. Rumus df_1 dan df_2 adalah:

$$df_1 = k-1; df_2=n-k$$

$$Uji F = \frac{r/k}{\frac{1-r}{n} - k - 1}$$

Keterangan:

F= Pendekatan distribusi Probabilitas Fisher

r = Koefisien regresi

k = jumlah variabel bebas

n = banyaknya sampel

Penolakan hipotesis atas dasar signifikansi pada taraf nyata 5% (taraf kepercayaan) dengan kriteria:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka ditolak dan diterima, yang berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka ditolak dan diterima, yang berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

DUSKUSI

Gambaran Umum Provinsi NTT

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah Provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini beribu kota di Kupang dan memiliki 22 Kabupaten / Kota yang terdiri dari sekitar 550 pulau. Tiga pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pulau Flores, Sumba dan Timor Barat. Sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada rentang ketinggian 100 s/d 500 meter di atas permukaan laut dengan luas $\pm 2.309.747$ Ha, sedangkan sebagian kecil atau 3,65% wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada ketinggian ± 1.000 m di atas permukaan laut. Lahan dengan Kemiringan ± 15 s/d 40% mencapai 38,07% dan lahan dengan kemiringan $> 40\%$ mencapai 35,46%.

Keadaan topografis Nusa Tenggara Timur berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadic pada gugusan yang sempit. Pada semua pulau dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, diapit daratan tinggi atau perbukitan. Lahan dengan kemiringan 15° s/d 40° mencapai luasan 38,07%. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada daratan sangat terbatas baik pertanian basah maupun lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah. Memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang berkisar antara ± 25 s/d 118 km. Di daratan Flores dan daratan Alor terdapat 11 gunung berapi dengan ketinggian berkisar antara ± 637 s/d 2.149 m di atas permukaan laut, yang sejak tahun 1881 sampai dengan Tahun 2004 tercatat semua gunung berapi yang ada pernah mengalami letusan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember-Maret arus angin banyak mengandung banyak uap air yang dari Asia Samudra Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Walaupun demikian Provinsi Nusa Tenggara Timur dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudra Pasifik sampai di wilayah Nusa Tenggara Timur kandungan uap air sudah berkurang yang menyebabkan volume hujan lebih sedikit di banding dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari-Maret, dan Desember) yang keadaan relative basah dan 8 bulan sisanya relative kering. Suhu udara maksimum rata-rata berkisar antara 30 s/d 36°C dan suhu udara minimum berkisar antara 21 s/d $24,5^\circ\text{C}$, dengan curah hujan rata-rata adalah 1.164 mm/tahun.

4.1.1. Batas Wilayah

Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Nusa Tenggara Timur terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudra Indonesia dan Laut Flores. Batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Flores
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.1.2. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah demografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi NTT berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2000 – 2019

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2000	1.971.737	1.976.863	3.948.600
2001	1.876.743	2.011.992	3.888.735
2002	1.880.723	2.044.148	3.924.871
2003	2.023.565	2.064.493	4.088.058
2004	2.088.156	2.100.618	4.188.774
2005	2.129.446	2.130.848	4.260.294
2006	2.122.045	2.138.249	4.355.121
2007	2.213.608	2.235.265	4.448.873
2008	2.256.609	2.277.710	4.534.319
2009	2.286.500	2.333.155	4.619.655
2010	2.332.943	2.373.249	4.706.192
2011	2.373.579	2.415.039	4.788.618
2012	2.414.295	2.456.932	4.871.227
2013	2.455.068	2.498.899	4.953.967
2014	2.495.917	2.540.980	5.036.897
2015	2.536.872	2.583.189	5.120.061
2016	2.577.953	2.625.561	5.203.514
2017	2.619.181	2.668.121	5.287.302
2018	2.660.613	2.710.906	5.371.519
2019	2.702.264	2.753.939	5.456.203

Sumber: Badan Pusat Statistik NTT tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat di jelaskan bahwa penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur berjenis kelamin perempuan lebih besar di dibandingkan dengan penduduk jenis kelamin laki-laki yang perkembangannya sampai tahun 2019 adalah jenis kelamin perempuan dengan jumlah sebesar 2.753.939 jiwa dan laki-laki sebesar 2.702.264 jiwa dengan total penduduk pada tahun 2019 sebesar 5.456.203 jiwa.

Selain itu juga terdapat jumlah penduduk provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kelompok umur. Untuk lebih mendetail maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur	Jumlah	Kelompok Umur	Jumlah
0 – 4	690.392	0 – 14	1.979.855
5 - 9	666.292		
10 -14	623.171		
15 -19	555.623		
20 – 24	447.097	15 -64	3.291.773
25 – 29	393.933		
30 – 34	374.573		
35 – 39	348.050		
40 – 44	319.284		
45 – 49	283.818		
50 – 54	240.752		
55 – 59	188.517		
60 – 64	140.126	65+	269.736
65 – 69	107.135		
70 – 74	78.079		
75 +	84.522		
Total			5.541.364

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. NTT tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka dapat di jelaskan bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu penduduk usia belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15–64 tahun) dan usia sudah tidak produktif (65+tahun). Tabel 4.2 tersebut menjelaskan bahwa jumlah penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) sebesar 3.291.773 jiwa jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia belum produktif (umur 0-14 tahun) dengan jumlah sebesar 1.979.855 jiwa dan usia tidak produktif (umur 65 tahun keatas) dengan jumlah sebesar 269.736 jiwa. Kondisi ini menjelaskan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur kaya akan sumber daya manusia yang berada pada usia produktif. Melimpahnya sumber daya manusia usia produktif ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan peningkatan kualitas, baik melalui pendidikan maupun keterampilan sehingga sumber daya manusia tersebut bisa mampu bersaing sesuai dengan tuntutan zaman dan apabila kualitas sumber daya manusia dari usia produktif ini rendah maka akan menjadi beban bagi pembangunan daerah.

4.1.3. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode

tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dapat di lihat pada grafik berikut ini

Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Prov.NTT Taun 2020

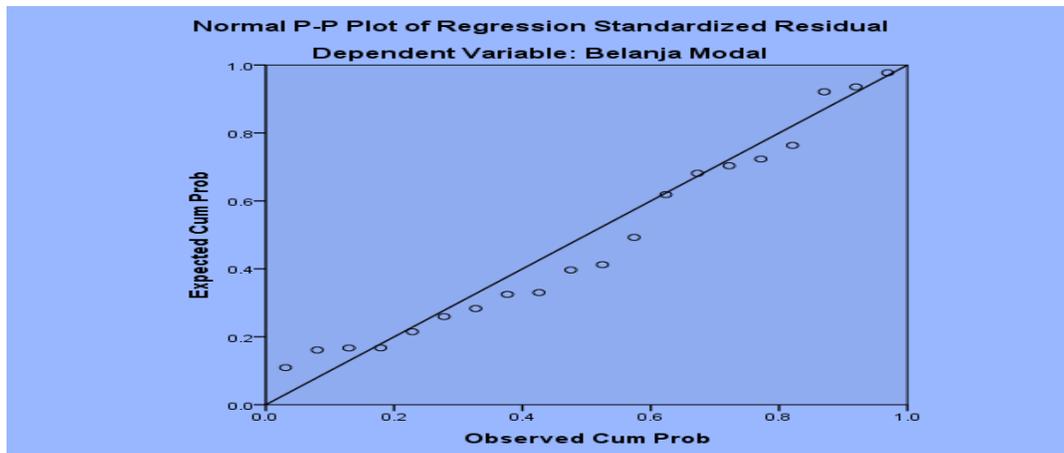
Berdasarkan grafik di atas maka dapat di jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 5,12 % kemudian mengalami penurunan sebesar 0.01% pada tahun 2016 yakni sebesar 5,11% , pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami peningkatan sebesar 5,13% dan kemudian pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan lagi menjadi 5,20%. berdasarkan hal ini dapat di jelaskan juga bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin membaik sehingga diharapkan terus adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada berbagai bidang ekonomi yang pada akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat provinsi Nusa Tenggara Timur.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Dasar pengambilan untuk uji normalitas data adalah: Jika data menyebar dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Akan tetapi jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat dari gambar Normal P-P Plot di bawah ini:

Gambar 4.1 Diagram Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: hasil olahan data sekunder dengan bantuan SPSS versi 20

Berdasarkan gambar diagram di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai residual menyebar secara teratur mengikuti sumbu diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal sehingga dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

Uji Multikoloniaritas

Multikoloniaritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variable independen. Pada model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna di antara variable bebas. Metode Uji Multikoloniaritas yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Inflation Faktor* (VIF) pada model regresi. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka tidak terdapat gejala Multikoloniaritas. Sebaliknya apabila nilai Tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10 maka terdapat gejala multikoloniaritas dalam model. Hasil uji multikoloniaritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil uji multikoloniaritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-	8.400	-	.000		
	PAD	40.333	.118	4.801	.000	.503	1.989
	Dana Bagi Hasil	-.125	.081	-.169	.689	.484	2.066
	Jumlah Penduduk	9.227	1.815	1.023	.508	.317	3.150

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Rekapitulasi Hasil olahan data sekunder dengan bantuan SPSS versi 29

Berdasarkan tabel *Output Coefficient* di atas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance variable Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,503 dan VIF sebesar 1,989, variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai tolerance sebesar 0,484 dan VIF sebesar 2,066 dan variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai tolerance sebesar 0,317 dan VIF sebesar 3,150. Hasil uji Multikoloniaritas ini menjelaskan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model penelitian ini.

4.2.1. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan *Uji Durbin Watson (DW test)*. Pengambilan keputusan pada uji *Durbin Watson* adalah sebagai berikut :

- Jika nilai $DU < DW < 4-DU$ maka tidak terjadi gejala autokorelasi.
- Jika nilai $DU < DL$ atau nilai $DW > 4 - DU$, artinya terjadi gejala autokorelasi.

Nilai DU dan DL ini dapat diperoleh dari tabel statistik *Durbin Watson* (Priyatno, 2013). Dari hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS 20 *for windows* diperoleh hasil dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.891 ^a	.794	.756	2.44807	1.954

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, PAD, Dana Bagi Hasil
b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Rekapitulasi Hasil olahan data sekunder dengan bantuan SPSS versi 20

Dari *output* di atas diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1,954 sedangkan nilai DU dan DL yang diperoleh dari tabel *Durbin Watson* dengan n (sampel) = 20 dan k (jumlah variabel = 4) diperoleh nilai **DL = 0,894** dan **DU = 1,828**. Jadi nilai DU sebesar **1,828** dan besaran nilai $4 - DU$ atau $4 - 1,828 = 2,172$ (Tabel *Durbin Watson* terlampir).

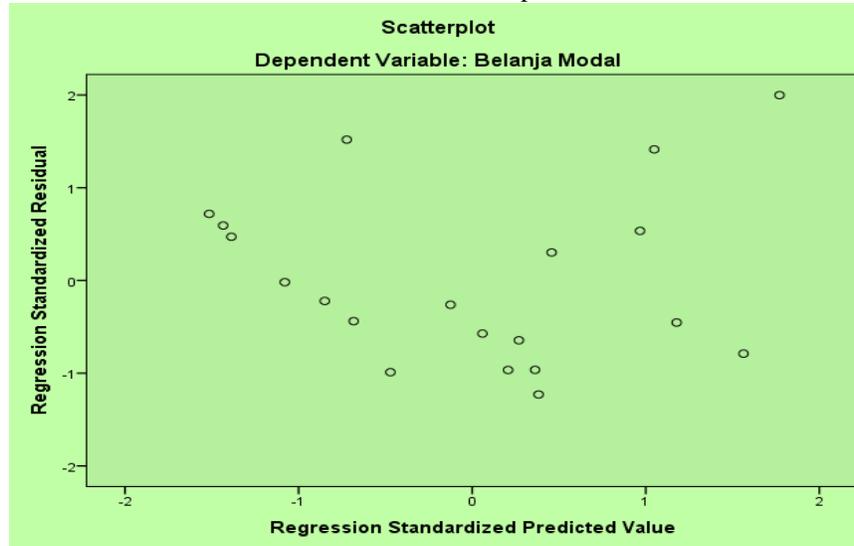
Dari hasil perhitungan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karena nilai DW (1,954) terletak diantara nilai DU (1,828) dan nilai $4-DU$ (2,172) atau **$1,828 < 1,954 < 2,172$** maka **tidak terdapat gejala autokorelasi** pada model regresi ini. Dengan demikian maka untuk pengujian hipotesis di atas dapat di lanjutkan.

Uji Heteroskedastitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heterokedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap pola scatterplot yang dihasilkan melalui program SPSS. Apabila pola scatter plot membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bebas heterokedastisitas sehingga model

regresi dapat dipakai. Hasil dari uji heterokedastisitas dengan menggunakan program SPSS 20 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2. Scatterplot



Sumber: hasil olahan data sekunder dengan bantuan SPSS versi 20

Pada grafik scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola jelas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.

Analisis Inferensial

Analisis Regresi Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih mendetail dapat dilihat pada hasil rekapitulasi berikut ini:

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) Terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Variabel	Koefisien Regresi (B)	F_{hitung}	F_{tabel}	Signifikansi
Constanta (β_0)	-40,333	20,590	3,34	0,000
PAD (X_1)	-0,125			
Dana Bagi Hasil (X_2)	-0,033			
Jumlah Penduduk (X_3)	9,227			
R	0,891			
R Square	0,795			

Sumber: Rekapitulasi Hasil Analisis SPSS 20. Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengujian regresi diatas maka dapat dijelaskan bahwa besarnya nilai antar variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) terhadap variabel Anggaran Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_i$$

$$Y = -40,333 - 0,125X_1 - 0,033X_2 + 9,227X_3 + \epsilon_i$$

Keterangan:

- Y = Anggaran Belanja Modal
- β_0 = Konstanta Intersept
- β_1 = Koefisien Variabel Pendapatan Asli Daerah
- β_2 = Koefisien Variabel Dana Bagi Hasil
- β_3 = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
- X_1 = Variabel Pendapatan Asli Daerah
- X_2 = Variabel Dana Bagi Hasil
- X_3 = Variabel Jumlah Penduduk
- ϵ_i = Error

Nilai konstanta (β_0) = -40,333, ini menjelaskan bahwa apabila tidak ada perubahan pada variable Pendaptan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk maka variabel Belanja Modal adalah sebesar Rp. -40,333. Akan tetapi jika ada perubahan pada variabel Pendaptan Asli Daerah sebesar Rp. 1000 dengan asumsi bahwa variabel lain yang berpengaruh dianggap konstan maka Anggaran Belanja Modal akan berkurang sebesar Rp. -0,125, jika ada perubahan pada variabel Dana bagi Hasil sebesar Rp.1000 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan maka Anggaran Belanja Modal akan berkurang sebesar Rp. -0,033 dan jika ada perubahan pada variabel Jumlah Penduduk sebesar 1000 jiwa dengan asumsi bahwa variabel lain yang berpengaruh dianggap konstan maka Anggaran Belanja Modal akan bertambah sebesar Rp. 9,277.

Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, peneliti memberikan kriteria sebagai berikut:

1. 0: Tidak ada hubungan antara dua variabel
2. $> 0 - 0,25$: hubungan sangat lemah
3. $> 0,25 - 0,5$: hubungan cukup
4. $> 0,5 - 0,75$: hubungan kuat
5. $> 0,75 - 0,99$: hubungan sangat kuat
6. 1: hubungan sempurna

Berdasarkan kriteria diatas maka dapat dijelaskan bahwa besarnya nilai koefisien regresi (R) variabel Pendaptan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,891 yang berarti bahwa antara variable Pendaptan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), Jumlah Penduduk (X_3) dan Anggaran Belanja Modal (Y) memiliki hubungan yang **sangat kuat**.

Koefisien Determinasi (R) menjelaskan tentang variabel Anggaran Belanja modal (Y) ditentukan oleh variable Pendaptan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Jumlah

Penduduk (X_3) yang dilihat dari hasil analisis koefisien determinan (R^2) diperoleh sebesar 0,795 yang berarti bahwa besarnya variabel Anggaran Belanja Modal dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) sebesar 79,5% sedangkan sisanya sebesar 20,5% di pengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Model	Coefficients ^a				Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-40.333	8.400		.000
	PAD	-.125	.118	-.169	.305
	Dana Bagi Hasil	-.033	.081	-.066	.689
	Jumlah Penduduk	9.227	1.815	1.023	.000

a. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal

Sumber : hasil analisis data dengan bantuan SPSS 20

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS diatas diperoleh t_{tabel} sebesar 1,745 dan t_{hitung} sebesar 1,060. Dengan demikian maka nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dimana $1,060 < 1,745$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,305 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara Parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel PAD (X_1) terhadap Anggaran Belanja modal (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian maka hipotesis yang mengatakan bahwa PAD (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat ditolak.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS diatas diperoleh t_{tabel} sebesar 1,745 dan t_{hitung} sebesar 0,407. Dengan demikian maka nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dimana $1,060 < 1,745$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,689 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara Parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel Dana Bagi Hasil (X_2) terhadap Anggaran Belanja modal (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian maka hipotesis yang mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat ditolak.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS diatas diperoleh t_{tabel} sebesar 1,745 dan t_{hitung} sebesar 5,083. Dengan demikian maka nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dimana $5,083 > 1,745$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara Parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Jumlah Penduduk (X_3) terhadap Anggaran Belanja modal (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian maka hipotesis yang mengatakan bahwa Jumlah Penduduk (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diterima.

Berdasarkan hasil output Spss diatas maka dapat dijelaskan bahwa Untuk alpha (α) sebesar 0,05 dengan $df1 = k - 1$ ($4 - 1 = 3$) dan $df2 = n-k-2$ ($20-4-2 = 14$) , maka dapat diperoleh F_{tabel} sebesar 3,34 dan F_{hitung} sebesar 20,590. Dengan demikian maka nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dimana $20,590 > 3,34$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) terhadap variabel Anggaran Belanja Modal (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian maka hipotesis yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Anggaran Belanja Modal (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diterima.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan pemerintah daerah wajib mampu menggali penerimaan daerah yang peruntukannya mendanai kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana menggunakan anggaran belanja modal.

Dana Bagi Hasil juga merupakan penunjang pemerintah daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah menggunakan belanja modal. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Padatnya penduduk membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik mengakibatkan penggunaan belanja modal yang besar dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk publik (masyarakat).

Dengan demikian maka berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan teori diatas mampu memperkuat hipotesis yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Dengan demikian maka hipotesis pertama Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal dapat diterima.

Sumbangan Efektif (SE)

Sumbangan efektif (SE) dimaksudkan untuk mengetahui besar pengaruh atau kontribusi masing-masing Variabel bebas (X) terhadap besarnya nilai variabel terikat (Y). Total kontribusi dari setiap variabel bebas (X) akan sama besarnya dengan nilai koefisien determinasi (R^2)

Tabel 9. Rekapitulasi Nilai Koefisien beta, Koefisien Korelasi dan SE

Variabel	Koefisien Beta	Koefisien Korelasi	SE
PAD	-0,169	0,429	-0,072
Dana Bagi Hasil	-0,066	0,548	-0,036
Jumlah Penduduk	1,023	0,883	0,903
Jumlah			0,795

Sumber: Rekapitulasi Hasil Analisis SPSS 20. Tahun 2020

Rumusan untuk menghitung SE adalah sebagai berikut:

$SE(X)\% = \text{Beta } X \text{ Koefisien Korelasi}$

1. Sumbangan Efektif variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) yaitu:

$$SE(X_1)\% = \text{Beta } X_1 \times r_{xy}$$

$$SE(X_1)\% = (-0,169) \times (0,429)$$

$$SE(X_1)\% = -0,072$$

2. Sumbangan Efektif variabel Dana Bagi Hasil (X_2) terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) yaitu:

$$SE(X_2)\% = \text{Beta } X_2 \times r_{xy}$$

$$SE(X_2)\% = (-0,066) \times (0,548)$$

$$SE(X_2)\% = -0,036$$

3. Sumbangan Efektif variabel Jumlah Penduduk (X_3) terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) yaitu:

$$SE(X_3)\% = \text{Beta } X_3 \times r_{xy}$$

$$SE(X_3)\% = (1,023) \times (0,883)$$

$$SE(X_3)\% = 0,903$$

Jadi sumbangan Efektif (SE) total dapat dihitung sebagai berikut:

$$SE \text{ total} = SE(X_1) + SE(X_2) + SE(X_3)$$

$$SE \text{ total} = -0,072 - 0,036 + 0,903$$

$$SE \text{ total} = 0,795$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa sumbangan efektif (SE) variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) adalah sebesar -0,072, kemudian sumbangan efektif variabel Dana bagi Hasil (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebesar -0,036 dan sumbangan efektif variabel Jumlah Penduduk (X_3) terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,903. Untuk sumbangan total adalah sebesar 0,795 atau sama dengan koefisien determinasi (R square) analisis regresi yakni 0,795.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X_3) memiliki pengaruh lebih dominan terhadap variabel Anggaran Belanja Modal (Y) di Provinsi NTT dari pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Bagi Hasil (X_2).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel jumlah penduduk yang berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdullah, Syukir. 2013 *Pengaruh Silpa Terhadap Belanja*. <http://syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pengaruh-silpa-terhadap-belanja/> diakses pada tanggal 16 November 2014.
- Aditya, Dina Mei Eka dan Maryono. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.
- Allen, Richard dan Tommasi Daniel, 2001. *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*, Paris: SIGMA-OECD.
- Amelina, Ridha (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Jumlah Penduduk, PAD, dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Anggaran Belanja Modal: Studi Kompartif Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Riau
- Badan Pusat Statistik, 2010. Data Statistik Indonesia. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, 2005. Diakses pada tanggal 29 April 2015. Dari <http://demografi.bgs.go.id/>.
- BPS. 2000 – 2019. *Provinsi NTT Dalam Angka*. Kupang: BPS Provinsi NTT
- Budi S. Purnomo. (2009). *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Darise Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI
- Darise Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Dedi Nordiwan dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heliyanto, Firnandi dan Nur Handayani 2016. “Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Hoesada, J., (2016) *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Nihayatul Fitiriana, 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Riau.
- Paujiah, Sri Puji. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Siliwangi.
- Permatasari, Isti dan Titik Mildawati, 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal dan Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pipin Syarifin dan Deda Jubaedah, *Hukum Pemerintah Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Rizanda. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*,
- Rutoto, Sabar. 2007. *Pengaturan Metodologi Penelitian*. FKIP. Universitas Muria Kudus.
- Sudarti. (2018). *Teori Pengukuran Nyeri & Nyeri Persalinan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Said dkk, 2001, *Manajemen Agribisnis*, Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif R&D*, Bandung Alfabeta.
- Sugiyono (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi pembangunan, proses, masalah dan dasar kebijaksanaan*. Jakarta: t.p.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPEF-UI Bima Grafika.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- ____Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Yandri, P. (2012). Yandri, Pitri Pelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Tangerang. *Ekonomika-Bisnis*.